



**EVALUASI PENERAPAN AKUNTANSI  
ASET TETAP KOTA BOGOR MENURUT PSAP NO. 07  
DI BKAD KOTA BOGOR**

Tugas Akhir

Oleh :  
Suci Alindiana  
081019018

**SEKOLAH VOKASI  
UNIVERSITAS PAKUAN  
BOGOR  
2022**

# **LEMBAR PENGESAHAN**

## **EVALUASI PENERAPAN AKUNTANSI ASET TETAP KOTA BOGOR MENURUT PSAP NO. 07 DI BKAD KOTA BOGOR**

Diajukan Oleh :  
Suci Alindiana  
081019018

Ditunjukkan sebagai salah satu syarat dalam mencapai gelar Ahli Madya  
Program Studi Akuntansi pada Sekolah Vokasi  
Universitas Pakuan Bogor

Mengetahui,

Dekan Sekolah Vokasi

Ketua Program Studi Akuntansi

(Dr. Tjut Awaliyah Zuraiyah, M. Kom.) (Dr. Lia Dahlia Iryani, SE., M.Si., CAP).

# **LEMBAR PERSETUJUAN**

## **EVALUASI PENERAPAN AKUNTANSI ASET TETAP KOTA BOGOR MENURUT PSAP NO. 07 DI BKAD KOTA BOGOR**

Tugas Akhir

Telah disidangkan dan dinyatakan lulus

Pada Hari Kamis, tanggal 28 Juli 2022

Suci Alindiana

081019018

Menyetujui,  
Ketua Penguji

Dr. Siti Maimunah, S.E., M.Si.,CAP.

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

Dr. Lia Dahlia Iryani, SE., M.Si., CAP.

Dr. Asep Alipudin, S.E., M.Ak.

## ABSTRAK

Aset tetap daerah merupakan sumber daya ekonomi yang dimiliki pemerintah, berwujud dan umur ekonomisnya lebih dari 12 bulan. Pada pengelolaannya aset tetap harus menerapkan peraturan yang ada seperti Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP), Peraturan Wali Kota dan sebagainya agar aset tersebut dapat digunakan dan dikelola secara efektif dan efisien

Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian pengelolaan aset tetap Kota Bogor yang diterapkan Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kota Bogor dengan PSAP No. 07 tentang akuntansi aset tetap. Adapun Metode dalam penelitian ini menggunakan metode wawancara, observasi, dan studi-studi literatur

Hasil pembahasan menunjukkan, terdapat beberapa hal yang harus dievaluasi kembali pada pengelolaan aset tetap pada BKAD Kota Bogor seperti dalam CaLK belum terdapat informasi tingkat penyelesaian dan jangka waktu penyelesaian suatu Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP), dan aset tetap yang telah dihentikan atau dilepaskan sebaiknya dalam CaLK dijelaskan pula kelanjutan dari aset tersebut yang tidak direklasifikasi, apakah pemerintah Kota Bogor menghancurkan aset tersebut, dijual dan sebagainya. Namun terlepas dari itu secara keseluruhan penerapan akuntansi aset tetap pada BKAD Kota Bogor telah sesuai PSAP No. 07 tentang akuntansi aset tetap.

**Kata Kunci : Aset, Aset Tetap, Barang Milik Daerah**

## **ABSTRACT**

*Regional fixed assets are economic resources owned by the government, tangible and have an economic life of more than 12 months. In managing fixed assets, they must apply existing regulations such as Government Accounting Standards (PSAP), Mayor Regulations and so on so that these assets can be used and managed effectively and efficiently.*

*This writing aims to determine the suitability of Bogor City's fixed asset management applied by the Regional Finance and Assets Agency (BKAD) of Bogor City with PSAP No. 07 on accounting for fixed assets. The method in this study uses interviews, observations, and literature studies.*

*The results of the discussion show, there are several things that must be re-evaluated in the management of fixed assets at the Bogor City BKAD as in CaLK there is no information on the level of completion and the completion period of an Internal Construction. Construction work (KDP), and fixed assets that have been discontinued or disposed of should be explained in the CaLK as well as the continuation of the assets that are not reclassified, whether the Bogor City government destroys the assets, sells them and so on. But apart from that, the overall application of fixed asset accounting at the Bogor City BKAD is in accordance with PSAP No. 07 on accounting for fixed assets.*

***Keywords: Assets, Fixed Assets, Regional Property***

## KATA PENGANTAR

Puji serta syukur kita panjatkan kepada Tuhan yang maha Esa yang telah memberikan nikmat, kesehatan, iman, dan hidayah sehingga Tugas Akhir yang berjudul “Evaluasi Penerapan Akuntansi Aset Tetap Kota Bogor menurut PSAP No. 07 di BKAD Kota Bogor ” dapat terselesaikan. Tugas Akhir ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan pendidikan program studi DIII akuntansi.

Terselesainya Tugas Akhir ini tidak lepas dari dukungan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Kedua orang tua tercinta yang telah berjuang memberikan segalanya, dukungan secara moral maupun materi dan keluarga yang memberikan semangat dan mendoakan penulis.
2. Bapak Prof. Dr. rer. pol. Ir. H. Didik Notosudjono M.Sc. selaku Rektor Universitas Pakuan.
3. Ibu Dr. Tjut Awaliyah Zuraiyah, M. Kom., selaku Dekan Sekolah Vokasi Universitas Pakuan.
4. Ibu Halimah Tus Sadiyah, M.Kom., selaku Wakil Dekan 1 Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Sekolah Vokasi Universitas Pakuan.
5. Ibu Yetty Husnul Haryati, SE., M.M., selaku Wakil Dekan II Bidang Keuangan Sekolah Vokasi Universitas Pakuan.
6. Ibu Dr. Dahlia Iryani, S.E., M. Si., CAP., selaku Ketua Program Studi Akuntansi Sekolah Vokasi Universitas Pakuan sekaligus pembimbing utama dan penguji 3 pada Tugas Akhir ini.
7. Bapak Dr. Asep Alipudin, S.E., M.Ak., selaku pembimbing pendamping dalam penyusunan Tugas Akhir ini.
8. Ibu Dr. Siti Maimunah, S.E., M.Si.,CAP., selaku dosen penguji 1 pada Tugas Akhir ini.
9. Bapak Satsangkaryon., Ak., M.M., selaku dosen penguji 2 pada Tugas Akhir ini.
10. Bapak H. Denny Mulyadi, S.E., selaku Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kota Bogor, Bapak Evandy Dhani, S.H., M.H. selaku

Sekretaris, Bapak Hotlan Jhon Meiti selaku Kepala Bagian Kepegawaian dan Umum di BKAD Kota Bogor yang telah menerima penulis untuk melaksanakan penelitian, dan Bapak Samsi Lutfi, S.E., selaku Kepala Sub Bidang Perencanaan Barang Milik Daerah (BMD) sebagai pembimbing lapangan di Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bogor.

11. Pegawai di lingkungan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bogor yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu dan membimbing selama proses penelitian ini berlangsung.
12. Teman-teman praktik kerja magang industri sesama mahasiswa yang senantiasa berjuang bersama selama proses penelitian dari awal hingga akhir.
13. Seluruh teman-teman mahasiswa dan Dosen Program Studi Akuntansi Sekolah Vokasi Universitas Pakuan.

Dalam penulisan Tugas Akhir ini, penulis telah melakukan dengan semua kemampuan semaksimal mungkin tapi penulis mengetahui sebagai manusia tak luput dari kekhilafan mengingat kekurangan pengetahuan dan pengalaman dalam karya tulis ilmiah. Kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan, semoga karya tulis ini dapat berguna dan bermanfaat bagi pembacanya.

Bogor, Juli 2022

Penulis

Suci Alindiana

## DAFTAR ISI

|   |             |
|---|-------------|
| <b>HALAMAN JUDUL</b> .....  | <b>i</b>    |
| <b>LEMBAR PENGESAHAN</b> .....  | <b>ii</b>   |
| <b>LEMBAR PERSETUJUAN</b> .....   | <b>iii</b>  |
| <b>ABSTRAK</b> .....  | <b>iv</b>   |
| <b>ABSTRACT</b> .....   | <b>v</b>    |
| <b>KATA PENGANTAR</b> .....   | <b>vi</b>   |
| <b>DAFTAR ISI</b> .....   | <b>viii</b> |
| <b>DAFTAR GAMBAR</b> .....  | <b>x</b>    |
| <b>DAFTAR TABEL</b> .....   | <b>xi</b>   |
| <b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....  | <b>xii</b>  |
| <b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....  | <b>1</b>    |
| 1.1. Latar Belakang .....   | 1           |
| 1.2. Rumusan Masalah .....  | 3           |
| 1.3. Ruang Lingkup dan Batasan Masalah .....                              | 4           |
| 1.4. Tujuan Penelitian .....  | 4           |
| 1.5. Manfaat Penelitian .....   | 5           |
| 1.6. Sistematika Penulisan.....   | 5           |
| <b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....                                      | <b>7</b>    |
| 2.1. Akuntansi Sektor Publik.....   | 7           |
| 2.1.1. Pengertian Akuntansi Sektor Publik.....                            | 7           |
| 2.1.2. Jenis Akuntansi Sektor Publik .....                                | 8           |
| 2.2. Pengertian Akuntansi Keuangan Daerah dan Aset Pemerintah Daerah..... | 9           |
| 2.2.1. Akuntansi Keuangan Daerah .....                                    | 9           |
| 2.2.2. Aset Pemerintah Daerah .....                                       | 9           |
| 2.3. Akuntansi Aset Tetap Daerah .....                                    | 10          |
| 2.3.1. Pengakuan .....  | 10          |
| 2.3.2. Pengukuran .....   | 11          |
| 2.3.3. Penyusutan Aset Tetap .....  | 11          |
| 2.3.4. Penghentian dan Pelepasan .....                                    | 12          |
| 2.3.5. Pencatatan Akuntansi Aset Tetap Daerah.....                        | 13          |
| 2.3.6. Pelaporan Akuntansi Aset Tetap Daerah.....                         | 14          |
| <b>BAB III METODE PENYELESAIAN MASALAH</b> .....                          | <b>17</b>   |
| 3.1. Metodologi Penyelesaian Masalah.....                                 | 17          |



|  |           |
|--|-----------|
| 3.2. Metode Pengumpulan Data.....  | 17        |
| 3.2.1. Jenis Data .....  | 17        |
| 3.2.2. Sumber Data.....  | 17        |
| 3.2.3. Teknik Pengumpulan Data.....  | 18        |
| 3.3. Alat Analisis Data .....  | 18        |
| 3.4. Proses Pengerjaan.....  | 18        |
| 3.5. Lokasi dan Waktu Penelitian .....   | 19        |
| <b>BAB IV HASIL DAN EVALUASI.....</b>  | <b>20</b> |
| 4.1. Hasil dan Pembahasan.....   | 20        |
| 4.1.1. Hasil Pengumpulan Data .....  | 20        |
| 4.1.2. Perbandingan Pengklasifikasian Aset Tetap.....                                | 21        |
| 4.1.3. Perbandingan Pengakuan Aset Tetap .....                                       | 21        |
| 4.1.4. Perbandingan Pengukuran Aset Tetap.....                                       | 22        |
| 4.1.5. Perbandingan Metode Penyusutan Aset Tetap.....                                | 23        |
| 4.1.6. Perbandingan Penghentian Dan Pelepasan Aset Tetap .....                       | 24        |
| 4.1.7. Perbandingan Pencatatan Aset Tetap .....                                      | 24        |
| 4.1.8. Perbandingan Pelaporan Keuangan Aset Tetap .....                              | 26        |
| 4.2. Evaluasi .....  | 28        |
| 4.2.1. Evaluasi perbandingan penerapan PSAP No. 07 dengan aset tetap Kota Bogor..... | 28        |
| <b>BAB V SIMPULAN DAN SARAN .....</b>  | <b>30</b> |
| 5.1. Simpulan.....   | 30        |
| 5.2. Saran.....  | 31        |
| <b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>   | <b>32</b> |
| <b>LAMPIRAN.....</b>   | <b>33</b> |

## DAFTAR GAMBAR

|  |    |
|--|----|
| Gambar 2.1 Jurnal Akuntansi Aset Tetap ..... | 13 |
| Gambar 4.1 Jurnal Aset Tetap SKPD .....      | 25 |
| Gambar 4.2 Jurnal Aset Tetap PPKD .....      | 26 |

**DAFTAR TABEL**

|   |    |
|---|----|
| Tabel 2.1 Laporan Neraca Aset Tetap .....                   | 15 |
| Tabel 4.1 Rincian Biaya Perolehan Aset Tetap.....           | 22 |
| Tabel 4.2 Ilustrasi Perhitungan Penyusutan Aset Tetap ..... | 24 |
| Tabel 4.3 Neraca Aset Tetap Kota Bogor .....                | 27 |

## DAFTAR LAMPIRAN

|   |    |
|---|----|
| Lampiran 1 Data Aset Tetap Kota Bogor .....                       | 33 |
| Lampiran 2 Data Aset Tetap Kota Bogor .....                       | 34 |
| Lampiran 3 Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja..... | 35 |
| Lampiran 4 Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Biaya .....  | 36 |
| Lampiran 5 Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Biaya .....  | 37 |
| Lampiran 6 Laporan Realisasi Saldo Anggaran Lebih.....            | 37 |
| Lampiran 7 Laporan Perubahan Ekuitas.....                         | 38 |
| Lampiran 8 Laporan Perubahan Ekuitas.....                         | 39 |
| Lampiran 9 Laporan Oprasional.....                                | 40 |
| Lampiran 10 Laporan Oprasional.....                               | 41 |
| Lampiran 11 Laporan Perubahan Ekuitas.....                        | 42 |
| Lampiran 12 Laporan Arus Kas .....                                | 43 |
| Lampiran 13 Laporan Arus Kas .....                                | 44 |
| Lampiran 14 Dokumen Pelepasan Aset Tetap Daerah .....             | 45 |
| Lampiran 15 CaLK aset tetap Kota Bogor di BKAD Kota Bogor.....    | 46 |
| Lampiran 16. CaLK aset tetap Kota Bogor di BKAD Kota Bogor.....   | 47 |
| Lampiran 17. CaLK aset tetap Kota Bogor di BKAD Kota Bogor.....   | 48 |
| Lampiran 18. CaLK aset tetap Kota Bogor di BKAD Kota Bogor.....   | 49 |
| Lampiran 19. CaLK aset tetap Kota Bogor di BKAD Kota Bogor.....   | 50 |
| Lampiran 20. CaLK aset tetap Kota Bogor di BKAD Kota Bogor.....   | 51 |
| Lampiran 21. Tampilan Aplikasi SIMRAL .....                       | 52 |

# **BABI**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Pelaksana pemerintahan di tingkat daerah yang disebut Perangkat Daerah (PD) bertanggung jawab kepada kepala daerah yang dibentuk atas dasar pertimbangan kebutuhan, karakteristik, dan kemampuan daerah. Susunan PD dibentuk sesuai kebijakan daerah masing-masing daerah guna tercapainya suatu tujuan. Agar tujuan tersebut tercapai, perangkat daerah dibagi menjadi beberapa bagian yang memiliki tugas dan perannya masing-masing. Mulai dari tingkat paling bawah seperti kelurahan dan kecamatan sampai dengan sekretaris DPRD dan Sekretaris Daerah.

Salah satu komponen yang memiliki peran penting adalah badan yang mengelola aset tetap daerah agar berjalan dengan baik dalam menjalankan kegiatan operasional. Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah No. 07 aset tetap merupakan aset berwujud yang dimiliki atau dikuasai pemerintah dan digunakan serta dimanfaatkan pemerintah dan masyarakat umum untuk masa kini dan masa yang akan datang, dapat diukur oleh satuan keuangan dan non keuangan atau yang dipelihara karena alasan historis budaya serta memiliki manfaat ekonomi lebih dari 12 bulan.

Dalam pemerintahan daerah aset tetap termasuk ke dalam salah satu bagian dari Barang Milik Daerah (BMD). Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 28 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (2020). Barang milik daerah merupakan barang yang dibeli dari APBN/APBD atau dari perolehan yang sah seperti perjanjian/kontrak, barang yang diperoleh berdasarkan peraturan perundang-undangan atau yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan.

Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bogor atau lebih dikenal dengan BKAD Kota Bogor adalah instansi pemerintahan yang mengelola seluruh aset Kota Bogor yang mencakup aset sekretariat daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah, Dinas-dinas dan badan-badan sampai kecamatan dan kelurahan termasuk aset-aset dari perangkat daerah lain yang berada di bawah kewenangan Daerah Kota Bogor. Aset tetap yang dikelola BKAD Kota Bogor di antaranya yaitu tanah;

jalan, irigasi, dan jaringan; aset tetap lainnya; gedung dan bangunan; konstruksi dalam pengerjaan, mulai dari perencanaan dan penganggaran, pengadaan, penatausahaan, penggunaan, pemanfaatan, pemindah tangan, pemusnahan, dan penghapusan sampai pengungkapan laporan keuangan

Aset tetap daerah termasuk dalam Akuntansi Sektor Publik (ASP) oleh karena itu dalam pengelolaan serta pencatatan aset tetap Kota Bogor tentunya harus menerapkan standar-standar yang berlaku di Indonesia yaitu Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), Peraturan Walikota Nomor 69 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 36 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kota Bogor, dan lain-lain. Agar dapat dipahami dan mudah dimengerti oleh pihak-pihak yang berkepentingan, memperkecil risiko penyelewengan dana dan pemborosan anggaran.

Fenomena yang ada pada BKAD Kota Bogor yaitu terkait Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP), di mana ada beberapa perangkat daerah yang mengabaikan dan tidak melanjutkan pembangunan yang diajukan pada tahun sebelumnya dan pada tahun anggaran baru mengajukan kembali pembangunan yang baru sehingga pembangunan sebelumnya ditunda dengan alasan lupa. Yang menjadi permasalahan adalah suatu KDP tidak dapat disusutkan, namun pada kenyataannya kualitasnya akan terus berkurang sehingga apabila tidak segera dilanjutkan akan menyebabkan ketidaksesuaian antara nilai yang tercatat dengan nilai wajar, serta dapat menimbulkan biaya renovasi dan lain sebagainya yang berakibat borosnya penggunaan anggaran (Kepala Bidang Perencanaan Barang Milik Daerah BKAD Kota Bogor 18 Februari 2022 ).

Penelitian yang akan penulis teliti lebih dalam berbeda dari segi topik dan subjek dengan penelitian terdahulu, sejauh dari pengamatan penulis bahwa penelitian ini belum pernah dilakukan pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bogor namun penelitian ini telah dilakukan dengan subjek yang berbeda seperti pada penelitian Christian Salanggamo (2020), selain itu penelitian ini telah dilakukan dengan topik yang berbeda pula seperti pada penelitian Dita Octaviani (2020).

Adapun diharapkan dari penelitian ini menjadi tambahan informasi dan pelengkap dari penelitian yang telah ada sebelumnya serta menjadi tambahan

referensi untuk penelitian selanjutnya mengenai aset tetap Kota Bogor, sebagai sarana dalam suatu pemecahan masalah, dan dapat dijadikan sebuah informasi dalam penyebaran ilmu pengetahuan.

Berdasarkan permasalahan dan latar belakang yang telah penulis sampaikan serta melihat pentingnya pengelolaan aset tetap yang sesuai dengan kebijakan-kebijakan serta peraturan-peraturan yang ada dalam hal ini PSAP oleh sebab itu penulis tertarik untuk meneliti topik penelitian dengan judul “Evaluasi Penerapan Akuntansi Aset Tetap Kota Bogor Menurut PSAP No. 07 di BKAD Kota Bogor”.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan di atas terkait pentingnya pengelolaan aset tetap yang baik, dengan menerapkan Standar Akuntansi Pemerintah No.07 tentang akuntansi aset tetap serta terkait fenomena yang terjadi di BKAD kota Bogor. Maka dari itu penulis merumuskan masalah pada penelitian ini sebagai berikut:

1. Apa BKAD Kota Bogor dalam mengklasifikasikan aset tetap telah menerapkan PSAP N0. 07?
2. Apa BKAD Kota Bogor dalam mengakui aset tetap telah menerapkan PSAP N0. 07?
3. Apa BKAD Kota Bogor dalam mengukur aset tetap telah menerapkan PSAP N0. 07?
4. Apa BKAD Kota Bogor dalam menyusutkan aset tetap telah menerapkan metode yang terdapat pada PSAP N0. 07?
5. Apa BKAD Kota Bogor dalam menghentikan dan melepaskan aset tetap telah menerapkan PSAP N0. 07?
6. Bagaimana penerapan PSAP No. 07 terkait pencatatan aset tetap yang dilakukan BKAD Kota Bogor?
7. Bagaimana penerapan PSAP No. 07 terkait pelaporan aset tetap yang dilakukan BKAD Kota Bogor?

### **1.3. Ruang Lingkup dan Batasan Masalah**

Dalam penelitian dengan topik aset tetap Kota Bogor ini dilakukan di BKAD Kota Bogor untuk periode tahun anggaran 2020-2021. Penulis membatasi penelitian aset tetap yang dikelola oleh BKAD Kota Bogor hanya pada:

1. Klasifikasi
2. Pengakuan
3. Pengukuran
4. Penyusutan
5. Penghentian dan Pelepasan
6. Pencatatan
7. Pelaporan

### **1.4. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui kesesuaian pengklasifikasian aset tetap Kota Bogor oleh BKAD Kota Bogor dengan PSAP No. 07.
2. Mengetahui kesesuaian pengakuan aset tetap Kota Bogor oleh BKAD Kota Bogor dengan PSAP No. 07.
3. Mengetahui kesesuaian pengukuran aset tetap Kota Bogor oleh BKAD Kota Bogor dengan PSAP No. 07.
4. Mengetahui kesesuaian penyusutan aset tetap Kota Bogor oleh BKAD Kota Bogor dengan PSAP No. 07.
5. Mengetahui kesesuaian penghentian dan pelepasan aset tetap Kota Bogor oleh BKAD Kota Bogor dengan PSAP No. 07.
6. Mengetahui kesesuaian pencatatan aset tetap Kota Bogor oleh BKAD Kota Bogor dengan PSAP No. 07.
7. Mengetahui kesesuaian pelaporan aset tetap Kota Bogor oleh BKAD Kota Bogor dengan PSAP No. 07.



### **1.5. Manfaat Penelitian**

Dengan dilakukannya penelitian terkait aset tetap ini penulis berharap dapat memberikan manfaat baik itu manfaat teoritis dan manfaat praktis :

#### 1. Manfaat Teoritis

Menambah wawasan serta ilmu pengetahuan baru bagi pembacanya mengenai akuntansi sektor publik yang mana dalam penelitian ini objeknya mengenai aset tetap dan subjeknya Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bogor.

#### 2. Manfaat Praktis

##### a. Bagi Mahasiswa

Sarana melatih keterampilan yang telah didapatkan selama perkuliahan dan mengimplementasikan pada dunia kerja yang sebenarnya serta menambah ilmu serta wawasan mengenai akuntansi aset tetap yang berada dalam lingkup pemerintah daerah.

##### b. Bagi BKAD Kota Bogor

Dapat menjadi bahan masukan mengenai akuntansi aset tetap Kota Bogor, dan menjadi bahan evaluasi dalam pengelolaan aset tetap Kota Bogor agar lebih baik lagi untuk kedepannya .

##### c. Bagi Pembaca

Dapat menjadi dasar serta referensi untuk penelitian lebih lanjut di kemudian hari bagi pembacanya.

### **1.6. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan Tugas Akhir ini dibagi menjadi beberapa bagian yaitu sebagai berikut:

#### **BAB I : PENDAHULUAN**

Untuk bab pertama ini menjelaskan tentang latar belakang, perumusan masalah, serta penentuan tujuan penelitian, ruang lingkup dan batasan masalah, manfaat penelitian serta sistematika penulisan.

#### **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Bab kedua ini berisi tinjauan pustaka yang berfokus pada teori-teori yang berhubungan dengan topik yang dibahas dalam penyusunan Tugas Akhir ini. Teori-teori ini berguna dalam menganalisis permasalahan yang diangkat.

### BAB III : METODE DAN PENYELESAIAN MASALAH

Bab ini menjelaskan mengenai langkah-langkah dan metodologi penyelesaian masalah, materi tugas akhir, alat dalam menganalisis data, metode dalam pengambilan data, proses pengerjaan serta lokasi dan waktu penelitian.

### BAB IV : HASIL DAN EVALUASI

Bab ini berisi mengenai pembahasan dari hasil penelitian setelah melakukan analisis data.

### BAB V : SIMPULAN DAN SARAN

Bab ini merupakan penutup yang berisi kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan. Dalam bab ini juga disajikan usulan yang diharapkan dapat menjadi masukan instansi tempat penelitian.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1. Akuntansi Sektor Publik**

##### **2.1.1. Pengertian Akuntansi Sektor Publik**

Akuntansi Sektor Publik (ASP) adalah cabang ilmu akuntansi yang dipraktikkan dalam instansi yang berkaitan dengan dana publik/masyarakat seperti pemerintah dan juga lembaga yang tidak bermaksud untuk mengambil keuntungan atas berjalannya organisasi tersebut. Menurut Mardiasmo (2018, 3) akuntansi sektor publik adalah sebuah akuntansi implementasi swasta ke pemerintah atau sederhananya dapat diartikan sebagai akuntansi pemerintah. Namun berdasarkan perkembangan terakhir akuntansi sektor publik ditafsirkan juga sebagai akuntansi dana masyarakat.

Bastian (2014, 6) menjelaskan dalam bukunya akuntansi sektor publik dapat didefinisikan sebagai serangkaian cara kerja, teknik serta prosedur akuntansi dan dipraktikkan pada lembaga-lembaga negara baik tingkat pusat maupun tingkat daerah dalam mengelola dana masyarakat.

Lebih jauh Halim (2014, 18) menjelaskan yang dimaksud akuntansi sektor publik merupakan serangkaian aktivitas yang memberikan sebuah informasi keuangan yang bersifat kuantitatif sesuai dengan institusi yang dikelola, informasi tersebut dipergunakan dalam melakukan pengambilan sebuah keputusan bagi pemangku kepentingan, baik itu eksternal maupun internal.

Dapat disimpulkan ASP adalah pengumpulan, pengelompokan, pencatatan, dan penyusunan laporan keuangan dana publik yang kemudian digunakan sebagai pertanggungjawaban kepada publik dan yang memiliki kepentingan dalam menentukan suatu keputusan.

### **2.1.2. Jenis Akuntansi Sektor Publik**

Jenis- jenis akuntansi sektor publik menurut Yuesti dkk. dalam Hartono dkk. (2021, 10) dibagi antara lain sebagai berikut :

1. Akuntansi Pemerintah Pusat

Akuntansi pemerintah pusat merupakan kegiatan akuntansi dari mulai pencatatan sampai pelaporan yang diimplementasikan pada lembaga yang berkedudukan di pemerintah pusat seperti kementerian, dewan perwakilan rakyat, mahkamah agung dan lain sebagainya.

2. Akuntansi Pemerintah Daerah

Seperti namanya akuntansi pemerintah daerah merupakan kegiatan akuntansi yang diterapkan pada lembaga yang berkedudukan di pemerintah daerah misalnya pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota dan lain-lain.

3. Akuntansi Partai Politik dan LSM

Akuntansi partai politik dan LSM merupakan ASP pada partai politik dan LSM yang mana menghasilkan sebuah laporan keuangan tahunan serta laporan keuangan dana kampanye.

4. Akuntansi Yayasan

Akuntansi yayasan bertujuan untuk menghasilkan laporan keuangan pada suatu yayasan yang menjadi bahan pertanggungjawaban terhadap anggota, penyumbang dan lain-lain

5. Akuntansi Pendidikan dan Kesehatan

Seperti halnya jenis akuntansi yang lain akuntansi pendidikan dan kesehatan merupakan serangkaian kegiatan akuntansi namun dilakukan pada instansi khusus dalam hal ini lembaga pendidikan dan kesehatan.

6. Akuntansi Peribadatan

Pada akuntansi peribadatan berlaku prinsip keadilan, kebenaran, dan pertanggungjawaban. Karena pada dasarnya akuntansi peribadatan diterapkan pada entitas yang berkaitan dengan keagamaan seperti akuntansi masjid, akuntansi gereja dan sebagainya.

Selain itu akuntansi sektor publik dapat diklasifikasikan berdasarkan ruang lingkungnya. Berikut jenis-jenis akuntansi berdasarkan ruang lingkungnya:

1. Akuntansi pemerintahan

Yaitu akuntansi sektor publik yang diimplementasikan dalam suatu pemerintahan baik itu pemerintah pada tingkat pusat maupun pemerintah pada tingkat daerah.

2. Akuntansi organisasi nirlaba

Yaitu akuntansi yang diterapkan pada suatu organisasi non pemerintahan misalnya seperti akuntansi untuk partai politik, akuntansi untuk yayasan, peribadatan dan lain-lain.

## **2.2. Pengertian Akuntansi Keuangan Daerah dan Aset Pemerintah Daerah**

### **2.2.1. Akuntansi Keuangan Daerah**

Akuntansi keuangan daerah adalah bagian dari akuntansi sektor publik sebagaimana yang didefinisikan oleh para ahli, akuntansi keuangan daerah menurut Sinurat (2018, 14) adalah serangkaian proses mulai identifikasi, pencatatan, pengukuran sampai pelaporan aktivitas finansial milik daerah baik itu provinsi ataupun kabupaten/kota yang digunakan sebagai pertimbangan untuk memutuskan suatu kebijakan oleh pihak-pihak eksternal seperti Badan Pengawas Keuangan (BPK), DPRD, investor dan lain sebagainya.

Afiah dkk. (2020, 14) juga menjelaskan akuntansi keuangan daerah merupakan aktivitas dalam pengelolaan keuangan daerah yang berfokus pada pencatatan, pengikhtisaran, dan pelaporan transaksi yang terjadi pada setiap tahun anggaran berjalan.

Maka dapat disimpulkan akuntansi keuangan daerah adalah sebuah proses mulai dari pencatatan, pengikhtisaran, pengukuran, dan pelaporan sehingga dapat menghasilkan sebuah laporan keuangan yang dipergunakan oleh pihak yang memiliki oleh kepentingan dalam pengambilan keputusan.

### **2.2.2. Aset Pemerintah Daerah**

Pemerintah daerah dalam kegiatan operasional tentunya membutuhkan fasilitas dalam menunjang suatu kegiatan salah satunya yaitu aset, maka dari itu pengertian aset menurut Kawatu (2019, 53) secara umum dapat didefinisikan sebagai nilai potensi ekonomi berwujud yang dimiliki suatu pemerintah daerah

dalam bentuk apa pun dan dipergunakan sampai tujuan yang telah ditetapkan tercapai.

Aset pemerintah daerah dalam laporan neraca berisi informasi aset yang memberikan gambaran kondisi ekonomi yang dimiliki oleh pemerintah daerah, baik itu aset lancar maupun aset tidak lancar atau aset tetap.

Menurut Setiabudhi (2019) Aset Daerah merupakan segala kekayaan yang berada di bawah kepemilikan pemerintah daerah yang mana aset tersebut perolehannya dapat melalui berbagai cara seperti dari beban APBD atau cara perolehan lain yang sah misalnya wakaf, donasi, hadiah, hibah dan lain sebagainya.

Sehingga dapat disimpulkan aset pemerintah daerah merupakan sumber daya ekonomi yang menunjukkan suatu kekayaan daerah dalam laporan neraca, berada di bawah kepemilikan suatu pemerintah daerah, yang perolehannya berasal dari beban APBD ataupun dari perolehan lain yang sah.

### **2.3. Akuntansi Aset Tetap Daerah**

Afiah (2020, 89) Secara umum aset tetap daerah adalah aset yang berwujud dengan umur ekonomis lebih dari satu tahun yang dipergunakan untuk berbagai keperluan baik itu aktivitas pemerintah atau untuk kepentingan masyarakat. Aset tetap dapat diklasifikasikan menjadi tanah; peralatan dan mesin; gedung dan bangunan; jalan, irigasi, dan jaringan, aset tetap lainnya; dan Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP).

#### **2.3.1. Pengakuan**

Aset tetap diakui pada saat memiliki nilai ekonomi di masa depan akan didapatkan dan apabila memenuhi syarat sebagai berikut:

1. Berwujud.
2. Memiliki umur manfaat minimal 1 tahun
3. Biaya untuk mendapatkan/memperoleh sebuah aset dapat diukur dengan andal
4. Aset tetap yang telah dimiliki bertujuan dengan maksud untuk digunakan
5. Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam aktivitas operasional normal entitas

### 2.3.2. Pengukuran

Seperti yang termuat pada SAP (2021) aset tetap dapat dinilai dengan dua metode yaitu metode biaya perolehan dan metode nilai wajar jika metode biaya perolehan tidak dapat digunakan.

#### 1. Biaya perolehan

Pengukuran biaya perolehan digunakan apabila dalam memperoleh aset tetap dilakukan pengeluaran biaya-biaya menggunakan kas dan setara kas misalnya biaya bahan baku untuk membangun sebuah gedung atau biaya pembelian tanah.

#### 2. Nilai wajar

Nilai wajar merupakan pengukuran nilai aset yang tidak dapat ditentukan menggunakan biaya perolehan, dikarenakan perolehan aset tersebut merupakan dari donasi, hibah, atau merupakan barang sitaan sehingga dinilai berdasarkan nilai wajar pada saat aset itu didapatkan.

### 2.3.3. Penyusutan Aset Tetap

Penyusutan aset tetap adalah pengurangan nilai aset karena kualitas atau dayanya terus berkurang pada setiap periode. Berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah metode penyusutan yang relevan digunakan dalam pemerintahan ada 3 metode yaitu:

#### 1. Metode garis lurus

$$\text{Penyusutan} = \frac{\text{Harga Perolehan} - \text{Nilai residu}}{\text{Umur Ekonomis}}$$

#### 2. Metode saldo menurun berganda

$$\text{Tarif penyusutan} = 2 \times \frac{1}{\text{Umur Ekonomis}} \times 100\%$$

$$\text{Penyusutan} = \text{Biaya perolehan aset tetap} \times \text{Tarif penyusutan}$$

#### 3. Metode unit produksi

$$\text{Tarif Penyusutan/Unit} = \frac{\text{Harga Perolehan - Nilai Sisa}}{\text{Taksiran Jumlah Produksi}}$$

$$\text{Penyusutan} = \text{Produksi Setahun X tarif penyusutan per unit}$$

Tentunya tidak semua yang terdapat pada klasifikasi aset tetap dapat disusutkan, melainkan ada beberapa aset yang tidak dapat disusutkan misalnya seperti tanah serta konstruksi dalam pengerjaan. Sedangkan untuk aset tetap lainnya disusutkan tidak secara periodik melainkan aset tetap lainnya akan dihapuskan dari pos aset tetap lainnya apabila aset tersebut sudah tidak dapat digunakan.

#### **2.3.4. Penghentian dan Pelepasan**

Dalam SAP (2021) Aset tetap dieliminasi dari laporan neraca ketika dilepaskan, dihentikan dari penggunaan dan apabila tidak ada manfaat ekonomi kemudian hari. Kemudian aset tetap juga dialihkan ke pos aset tetap lainnya ketika tidak memenuhi definisi aset tetap.



### 2.3.5. Pencatatan Akuntansi Aset Tetap Daerah

#### Tanah

Jurnal umum pembelian tanah secara tunai

|                        |       |       |
|------------------------|-------|-------|
| Aset tetap- Tanah      | xxxxx |       |
| Kas di kas umum daerah |       | xxxxx |

Jurnal umum tanah dari hibah/donasi

|                      |       |       |
|----------------------|-------|-------|
| Aset tetap- Tanah    | xxxxx |       |
| Pendapatan hibah- LO |       | xxxxx |

#### Peralatan dan Mesin

Jurnal umum peralatan dan mesin pembelian tunai

|                                 |       |       |
|---------------------------------|-------|-------|
| Aset Tetap- Peralatan dan Mesin | xxxxx |       |
| Kas di kas umum daerah          |       | xxxxx |

Jurnal umum peralatan dan mesin pembelian kredit

|                                 |       |       |
|---------------------------------|-------|-------|
| Aset Tetap- Peralatan dan Mesin | xxxxx |       |
| Kewajiban                       |       | xxxxx |

Jurnal umum peralatan dan mesin dari hibah/donasi

|                                 |       |       |
|---------------------------------|-------|-------|
| Aset Tetap- Peralatan dan Mesin | xxxxx |       |
| Pendapatan hibah- LO            |       | xxxxx |

#### Gedung dan Bangunan

Jurnal umum pembelian gedung dan bangunan secara tunai

|                                 |       |       |
|---------------------------------|-------|-------|
| Aset Tetap- Gedung dan Bangunan | xxxxx |       |
| Kas di kas umum daerah          |       | xxxxx |

Jurnal umum pembelian gedung dan bangunan secara kredit

|                                 |       |       |
|---------------------------------|-------|-------|
| Aset Tetap- Gedung dan Bangunan | xxxxx |       |
| Kewajiban                       |       | xxxxx |

#### Aset Tetap Lainnya

Jurnal umum aset tetap lainnya melalui pembelian secara tunai

|                                |       |       |
|--------------------------------|-------|-------|
| Aset Tetap- Aset Tetap Lainnya | xxxxx |       |
| Kas di kas umum daerah         |       | xxxxx |

Jurnal umum aset tetap lainnya dari hibah/donasi

|                                |       |       |
|--------------------------------|-------|-------|
| Aset Tetap- Aset Tetap Lainnya | xxxxx |       |
| Pendapatan hibah- LO           |       | xxxxx |

#### Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Jurnal umum jalan, irigasi, dan jaringan yang diakui dalam neraca

|   |       |       |
|---|-------|-------|
| Aset Tetap - Jalan, Irigasi, dan Jaringan | xxxxx |       |
| Kas di kas umum daerah                    |       | xxxxx |

#### Kontruksi Dalam Pengerjaan (KDP)

Jurnal umum KDP

|   |       |       |
|---|-------|-------|
| Kontruksi Dalam Pengerjaan (Jenis Aset Tetap) | xxxxx |       |
| Kas di Kas Umum Daerah                        |       | xxxxx |

Sumber : Buletin Teknis No. 15 Akuntansi Aset Tetap Basis Akrual (2019)

Gambar 2.1 Jurnal Akuntansi Aset Tetap

Berdasarkan Buletin Teknis (2019) “Masing-masing entitas dapat mengembangkan jurnal-jurnal tersebut dalam sistem sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan masing-masing entitas”.

### **2.3.6. Pelaporan Akuntansi Aset Tetap Daerah**

Pelaporan keuangan dalam suatu entitas pemerintah daerah harus memuat beberapa hal sebagaimana yang dijelaskan dalam Peraturan Walikota Nomor 130 tentang Ketentuan Akuntansi Pemerintah Daerah Kota Bogor (2019) di antaranya sebagai berikut:

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Pendapatan dan Belanja

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Pendapatan dan Belanja merupakan laporan keuangan yang berisikan perbandingan antara anggaran dan realisasinya pada satu periode pelaporan, yang digunakan dalam mengevaluasi keputusan dalam mengalokasikan dana. Ilustrasi LRA Pendapatan dan Belanja dapat terlihat pada lampiran 3, 4, dan 5.

2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

Laporan Saldo Anggaran Lebih merupakan laporan keuangan yang menampilkan perbandingan anggaran pada awal dan akhir periode. Ilustrasi LSAP dapat terlihat pada lampiran 6.

3. Laporan Neraca

Laporan Neraca merupakan laporan keuangan yang menunjukkan posisi keuangan pemerintah daerah mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu. Ilustrasi laporan neraca dapat terlihat pada lampiran 7 dan lampiran 8.

4. Laporan Operasional

Laporan Operasional (LO) merupakan laporan keuangan yang memuat informasi mengenai seluruh kegiatan keuangan entitas. Ilustrasi laporan operasional dapat terlihat pada lampiran 9 dan lampiran 10.

5. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) merupakan laporan keuangan yang memuat informasi mengenai ekuitas awal, surplus/defisit, dan koreksi atas

kesalahan atau perubahan nilai aset. Ilustrasi laporan perubahan ekuitas dapat terlihat pada lampiran 11.

#### 6. Laporan Arus Kas

Laporan Arus Kas (LAK) merupakan laporan keuangan yang memuat informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas. Ilustrasi laporan arus kas dapat terlihat pada lampiran 12 dan lampiran 13.

#### 7. Catatan atas Laporan Keuangan

Bahasa yang digunakan pada pelaporan yaitu menggunakan bahasa Indonesia serta *currency* rupiah.

### 2.3.6.1. Laporan Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan

Dalam penelitian ini yang akan dibahas berfokus pada laporan neraca dan CaLK bagian aset tetap saja, oleh karena itu berikut ilustrasi laporan neraca aset tetap dan pernyataan yang diharuskan ada pada CaLK untuk penjelasan laporan neraca aset tetap yang terdapat pada Buletin Teknis No. 15 mengenai Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah No. 07 tentang Aset Tetap.

### 2.3.6.2. Laporan Neraca Aset Tetap

Tabel 2.1 Laporan Neraca Aset Tetap

| Pemerintah Kota ABC<br>Neraca Parsial Pemerintah Daerah<br>Per 31 Desember 20XX dan 31 Desember 20XY |            |            |
|--|------------|------------|
|  | 31/12/20XY | 31/12/20XX |
| Aset   |            |            |
| Aset Tetap   |            |            |
| Tanah  | xxxxx      | xxxxx      |
| Peralatan dan Mesin  | xxxxx      | xxxxx      |
| Gedung dan Bangunan  | xxxxx      | xxxxx      |
| Jalan, Irigasi, dan Jaringan   | xxxxx      | xxxxx      |
| Aset Tetap Lainnya   | xxxxx      | xxxxx      |
| Konstruksi Dalam Pengerjaan  | xxxxx      | xxxxx      |
| Akumulasi Penyusutan   | xxxxx      | xxxxx      |
| Jumlah Aset Tetap  | xxxxx      | xxxxx      |

Sumber : Buletin Teknis No. 15 Akuntansi Aset Tetap Basis AkruaI (2019)

### 2.3.6.3. Catatan atas Laporan Keuangan

Laporan keuangan tidak terkecuali pada laporan keuangan pemerintah daerah tidak terlepas dari Catatan atas Laporan Keuangan, karena berisi penjelasan dari setiap pos yang ada pada laporan keuangan. Menurut Tanjung (2012, 209) “CaLK mengatur penyajian dan pengungkapan yang diperlukan, tujuannya adalah untuk meningkatkan transparansi laporan keuangan dan penyediaan pemahaman yang lebih baik atas informasi keuangan pemerintah”

Berdasarkan Buletin Teknis (2019) CaLK mengenai laporan neraca, bagian aset tetap harus mengungkapkan:

1. Dasar penilaian dalam melakukan pencatatan aset tetap.
2. Ketentuan pendanaan yang berhubungan dengan aset tetap.
3. Penyesuaian nilai tercatat aset tetap pada awal periode dan akhir periode yang menunjukkan:
  - a. Penambahan aset tetap baik itu melalui pembelian ataupun cara lain seperti dilakukannya reklasifikasi aset tetap, adanya hibah atau donasi, pertukaran dan lain sebagainya.
  - b. Rekonsiliasi aset tetap yang didapatkan melalui pembelian atau pembangunan dengan total belanja modal.
  - c. Pengurangan nilai aset tetap yang disebabkan aktivitas yang mengurangi nilai aset tetap seperti penjualan, menghibahkan atau mendonasikan aset tetap, reklasifikasi dan lain-lain.
  - d. Serta hal lainnya jika ada yang menyebabkan perubahan nilai aset tetap.
4. Hal-hal terkait penyusutan aset tetap seperti metode dan tarif penyusutan yang dipakai, umur ekonomis setiap aset, nilai penyusutan dan lain sebagainya.
5. Serta informasi terkait konstruksi dalam pengerjaan yang mana harus memuat:
  - a. Jangka waktu penyelesaian beserta tingkat penyelesaian KDP pada waktu pelaporan dan perincian lain seperti nilai kontrak dan lain sebagainya yang termuat dalam kontrak pembangunan aset tetap.
  - b. Sumber pembiayaan untuk membangun aset tetap.
  - c. Akumulasi biaya dan uang muka yang telah pakai hingga waktu dilakukannya pelaporan.
  - d. Retensi atau jumlah termin yang masih harus dibayar.